



KONTRAK KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TENTANG

**PEMBINAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK
DAN
PEMBINAAN BAHASA INDONESIA DALAM TATA NASKAH DINAS**

Nomor : 2662/I5.18/AK.00.07/2024

Nomor : PKS/788/XII/KA/PC.01.02/2024/BNNP

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan (9), bulan Desember (12), tahun dua ribu puluh empat (2024), bertempat di Hotel Santika, Jalan Pejanggik Nomor 32, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum., Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **M. Ridwan, S.A.P., Selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat**, berdasarkan surat perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Sprin/2116/VI/KA/KP.05.01/2024/BNN Tanggal 10 Juni 2024 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BNNP NTB, yang berkedudukan di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kontrak kerja sama dalam penyelenggaraan Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Tata Naskah Dinas.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Tata Naskah Dinas antara kedua belah pihak.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Tata Naskah Dinas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Tata Naskah Dinas.

PASAL 4

METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan dalam rangka Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Tata Naskah Dinas ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar PARA PIHAK karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara PARA PIHAK, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan KEDUA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon/WA : 08563758246

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

b. M. Ridwan, S.A.P.

Alamat : Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon/WA : 081246332929

Posel : bnnp_ntb@bnn.go.id

- c. PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- d. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Rini Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

PIHAK KEDUA

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



M. Ridwan, S.A.P.
NIP 196707231988031001